

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada pertengahan tahun 1880-an, di Amerika Serikat, mata pelajaran civics diperkenalkan untuk pertama kalinya (Budimansyah, 2008: 2). Ini terjadi seiring dengan masuknya imigran dari Eropa seperti Perancis, Inggris, Jerman, Belanda, Italia, Spanyol, dan Portugal ke Amerika Serikat pada abad ke-19. Kebanyakan dari mereka datang dengan sedikit pengetahuan tentang negara ini. Oleh karena itu, pemerintah AS berupaya menyatukan masyarakat melalui pendidikan sekolah dengan memasukkan civics ke dalam kurikulum.

Konsep pembelajaran "civic" diperkenalkan oleh Legiun Veteran Amerika dengan tujuan memperkokoh persatuan bangsa Amerika yang beragam dalam hal ras, budaya, dan asal-usul. Legiun tersebut meyakini bahwa pemahaman akan nilai-nilai perjuangan dalam membangun bangsa Amerika merupakan landasan penting bagi masyarakatnya untuk menghargai dan membangun negara secara demokratis dan bertanggung jawab. Pengembangan civics di Amerika pada masa itu didasarkan pada teori psikologi, terutama "Faculty Psychology", yang menekankan pentingnya keseimbangan pikiran dan tubuh dalam proses pembelajaran. Teori ini menegaskan bahwa jika terdapat kesalahan dalam pembelajaran, penyebabnya bukanlah fisik tetapi mental. Pada awal abad ke-20, mata pelajaran civics berkembang dengan memasukkan materi tentang struktur pemerintahan negara bagian dan federal (Gross dan Zeleny, dalam Budimansyah, 2010: 108). Kemudian, Dunn (1915) memperkenalkan gagasan new civics yang menekankan pentingnya kehidupan berkomunitas. Seiring waktu, istilah civics mulai merujuk pada berbagai sub-bidang pembelajaran seperti vocational civics, community civics, dan economic civics, yang masing-masing berkaitan dengan karir, kehidupan masyarakat, dan ekonomi. Salah satu tujuan utama pembelajaran civics pada abad ke-20 adalah pengembangan keterampilan sosial dan kompetensi kewarganegaraan, serta pembentukan karakter yang baik.

Menurut Numan Sumantri, konsep civics, yang berasal dari zaman Yunani, merujuk pada penduduk sipil yang terlibat dalam praktik demokrasi langsung di "negara kota" (polis). Amerika Serikat kemudian mengadopsi istilah ini untuk mengajar politik demokrasi di sekolah-sekolah dan untuk membedakannya dalam pengajaran ilmu politik

di perguruan tinggi. Pendekatan psikologis digunakan dalam pengaturan materi civics agar sesuai dengan pemahaman yang sesuai dengan usia pelajar. Pelajaran civics mulai diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1970 dengan tujuan untuk memperkuat identitas nasional. Materi pembelajaran mencakup topik seperti pemerintahan, hak, dan tanggung jawab warga negara.

Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sejarah perkembangan ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat. Pada tahun 1962, karena adanya kekhawatiran terhadap aspek indoktrinasi dalam pelajaran Civics, Suhardjo, yang menjabat sebagai menteri kehakiman, mengusulkan penggantian istilah Civics dengan Kewargaan Negara. Usulan tersebut disetujui oleh Prijono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Namun, secara resmi, pergantian istilah ini belum ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Wuri dan Fathurrohman, 2012: 2). Pada periode tersebut, sistem pendidikan di Indonesia menggunakan dua istilah yang berbeda untuk mata pelajaran kewarganegaraan, yaitu Civics dan Kewargaan Negara, yang digunakan secara bergantian dalam kurikulum SD, SMP, dan SMA. Perbedaan utama antara kedua istilah tersebut adalah bahwa Civics fokus pada pengajaran sejarah perjuangan Indonesia, sementara Kewargaan Negara menekankan kesadaran hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab atas hak dan kewajiban mereka. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk membentuk warga negara yang berkualitas dan cerdas sesuai dengan visi negara Indonesia.

Pada tahun 1966, saat terjadi pergantian rezim dari pemerintahan Soekarno ke Soeharto, terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan yang juga memengaruhi kebijakan pendidikan. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 31 Tahun 1967 menetapkan bahwa pelajaran Civics harus mencakup Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPRS, dan pengetahuan tentang PBB, dengan tujuan membentuk warga negara Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sejalan dengan TAP MPRS No.XXVII/MPRS/1966.

Pada tahun 1968, dikeluarkan Kurikulum 1968 yang menggantikan Civics dengan Pendidikan Kewargaan Negara (PKN), dengan bahan pokok meliputi pengetahuan Kewarganegaraan, sejarah Indonesia, dan ilmu bumi untuk Sekolah Dasar;

sejarah kebangsaan, peristiwa pasca kemerdekaan, UUD 1945, Pancasila, dan ketetapan MPRS untuk Sekolah Menengah Pertama; serta pasal-pasal UUD 1945 yang terkait dengan Tata Negara, Sejarah, Ilmu Bumi, dan Ekonomi untuk Sekolah Menengah Atas. Pendidikan tinggi juga melibatkan mata kuliah seperti Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan, yang mewajibkan mahasiswa untuk memahami bela negara dalam konteks ketahanan nasional. Mata kuliah ini harus diajarkan di setiap perguruan tinggi dan fakultas. Pada tahun 1973, terjadi perubahan kurikulum lagi dengan munculnya kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP), di mana pendidikan kewarganegaraan menggunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara, Studi Sosial, Civics, dan Hukum. Di SD, istilah yang digunakan adalah Pendidikan Kewargaan Negara atau IPS terpadu, mirip dengan Integrated Social Studies di Amerika. Di SMP, digunakan istilah Studi Sosial sebagai pengganti IPS terpadu untuk semua kelas, dengan Pendidikan Kewargaan Negara tetap sebagai mata pelajaran inti yang wajib diambil di semua jenjang pendidikan.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang harus diikutsertakan dalam kurikulum sekolah dasar, menengah, dan tinggi (Pasal 37). Pasal 37 bagian penjelasan dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air pada peserta didik. Dengan demikian, pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai fondasi pengembangan multikultural dalam sistem pendidikan Indonesia semakin terlihat nyata..

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dampak signifikan pada kesatuan bangsa. Peranannya dalam menumbuhkan semangat nasionalisme sangat penting, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa depan pembangunan bangsa. Semangat ini tetap relevan dan bahkan lebih diperlukan di era teknologi informasi yang semakin canggih dan globalisasi yang semakin cepat. Untuk itu, nilai-nilai dasar sebagai fondasi bangsa harus diperkuat. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga merupakan bagian integral dalam memperkuat kesatuan bangsa. Fungsinya adalah untuk menjelaskan eksistensi dan proses sosial negara kita. (Kartodirdjo, 1999:25).

Diskusi tentang integrasi bangsa tidak lagi menjadi fokus utama dalam analisis politik karena sering dikuasai oleh pemerintah, yang kurang memperhatikan jenis kesadaran nasionalisme yang diperlukan. Kesadaran semacam ini mengesampingkan

keragaman dan mengabaikan penghargaan terhadap akar sosial-budaya yang bersifat Multikultural, yang menuntut kesetaraan dalam masyarakat yang beragam dan belum terakomodasi. Proses menuju pengakuan ini adalah tantangan yang besar, dan pandangan terhadap realitas multikultural masyarakat telah mengalami perubahan sepanjang sejarah. Dalam konteks perkembangan realitas multikultural, peran pendidikan menjadi sangat penting. Arza (2006:153) berpendapat bahwa pembentukan masyarakat multikultural Indonesia yang sehat tidak dapat dianggap remeh atau dicoba-coba, melainkan harus dilakukan secara sistematis, terprogram, terintegrasi, dan berkelanjutan. Salah satu strategi kunci adalah pendidikan multikultural yang dapat diterapkan baik dalam lingkungan pendidikan formal maupun informal, secara langsung maupun tidak langsung..

Pendidikan multikultural bertujuan untuk mengembangkan kesadaran, toleransi, pemahaman, serta mengenali perbedaan dan kesamaan antar budaya serta hubungannya dengan pandangan dunia, konsep, nilai, keyakinan, dan sikap (Saha, 1997, dalam Aly, 2005). Indonesia, sebagai negara dengan beragam kelompok etnis, budaya, dan agama, menunjukkan kemajemukan sosial yang unik, baik secara horizontal — dalam bentuk kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, dan kedaerahan — maupun secara vertikal, antara lapisan atas dan bawah yang berbeda secara signifikan (Nasikun, 2007:33; Hefner, 2007:16). Konsep ini tercermin dalam prinsip bhineka tunggal ika, yang menekankan bahwa meskipun Indonesia multikultural, ia tetap satu kesatuan.

Dalam konteks epistemologi, pendidikan kewarganegaraan dikembangkan dalam tradisi pendidikan kewarganegaraan, yang tujuannya sesuai dengan aspirasi nasional masing-masing negara. Namun, secara umum, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang berkualitas, yaitu individu yang memiliki kecerdasan, baik secara intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; merasa bangga dan bertanggung jawab; serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara guna menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air..

Multikulturalisme dapat diartikan sebagai keadaan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Dalam QS. Al-Hujurat, Allah SWT menyatakan, "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Hal ini juga tercermin dalam konteks Indonesia, di mana keberagaman etnis, ras, dan suku bangsa menjadi fakta yang tak terbantahkan. Secara hukum, hal ini tercermin dalam

Pancasila sebagai landasan ideologi negara yang mencerminkan pluralitas masyarakat dan bangsa Indonesia. UUD RI 1945 juga secara tegas mengakui multikulturalisme bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercermin dalam lambang negara "Bhinneka Tunggal Ika" serta dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menegaskan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa, dan tekad untuk menjadi bangsa yang memiliki satu bahasa, satu tanah air: Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran vital dalam mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang berkomitmen kuat untuk mempertahankan Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan multikultural di Indonesia yang disampaikan oleh Tillar (2004:192), yaitu membentuk pribadi-pribadi bangsa Indonesia yang memelihara dan mengembangkan kebudayaan suku masing-masing, sambil membangun bangsa Indonesia sesuai dengan kebudayaan yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Menurut Cogan (1998:117), pengembangan karakteristik warga negara harus direfleksikan dalam kebijakan pendidikan kewarganegaraan multidimensional, yang mencakup empat dimensi yang saling berinteraksi, yaitu dimensi personal, sosial, spasial, dan temporal. Keempat dimensi ini akan membentuk atribut kewarganegaraan yang mungkin bervariasi di setiap negara sesuai dengan konteks sistem politiknya, termasuk rasa identitas, pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban, minat dan keterlibatan dalam urusan publik, serta penerimaan nilai-nilai masyarakat dasar. Bagi Indonesia, karakter kewarganegaraan akan disesuaikan dengan ideologi yang dianut, yaitu Pancasila, dan konstitusi yang berlaku, yakni UUD 1945..

Empat dimensi kewarganegaraan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menjadi pedoman untuk mengembangkan nasionalisme yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara dalam masyarakat multikultural. Oleh karena itu, kita diharapkan untuk mampu mengintegrasikan multikulturalisme ke dalam pendidikan agar dapat menjadi kekuatan positif dalam memperkuat nasionalisme warga negara, khususnya. Seperti yang diungkapkan oleh Naisbitt (1994: 15), seorang futuris terkemuka, masalah suku bangsa atau etnis dapat menjadi bumerang bagi negara yang tidak aktif dalam kebijakan politiknya. Kelompok minoritas ini rentan menjadi sasaran intimidasi oleh mayoritas mereka dan bisa mengancam perkembangan demokrasi, serta memicu konflik antar etnis minoritas itu sendiri.

Pendidikan kewarganegaraan itu sendiri berperan sebagai elemen penting dalam pengembangan nasionalisme kultural dengan berfungsi sebagai mediasi dalam membangun hubungan antar unsur-unsur masyarakat yang beragam. Menurut Anderson (1983: 12-16), identitas nasional memiliki peranan signifikan sebagai pengaruh utama yang berlangsung lama dalam identitas kultural kolektif. Vanderburg (1985: 272) menambahkan bahwa selain melalui pendidikan kewarganegaraan, perlu juga pembentukan model-model perilaku yang memperkuat nasionalisme kultural untuk menciptakan pola hubungan yang mengatasi berbagai dimensi lingkungan temporal dan spasial. Ohmae (1993: 183-185; 2002: 171-175) menyoroti bahwa secara politis, batas-batas antar negara semakin kabur. Inilah mengapa, menurut Mazlish dan Buultjes (1993: 2), titik awal sejarah global adalah melalui penguatan fenomena globalisasi yang memiliki dampak luas, membawa harapan dan kecemasan.

Globalisasi semakin menguat dalam pengaruhnya, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam upaya memelihara dan meningkatkan integrasi bangsa, menjadi fokus yang penting. Kesadaran yang ditanam melalui pembelajaran kewarganegaraan yang berbasis multikultural diharapkan tidak hanya memperkaya kekayaan budaya bangsa, tetapi juga meningkatkan pemahaman akan kesetaraan dan keragaman manusia, yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya suatu integrasi bangsa yang didasarkan pada rasa memiliki dan solidaritas. Pemahaman akan rasa memiliki harus terus dibangun dan dikembangkan di kalangan pelajar agar mereka dapat mencapai kesadaran diri sebagai individu, anggota suku, atau warga negara. Sementara itu, solidaritas dijalin melalui kesempatan dan tanggung jawab sosial bersama, dengan penekanan pada prinsip pemerataan dan keadilan.

Pembelajaran kewarganegaraan yang efektif akan membawa kedamaian hati siswa yang mengakui dan menghargai beragam potensi individu, kelompok, dan daerah, sambil menekankan pentingnya kebersamaan yang seimbang dan harmonis. Selama ini, pembelajaran kewarganegaraan cenderung kurang sensitif terhadap akar budaya dan semangat kebersamaan sebagai bangsa, karena kurang mampu menyentuh sisi-sisi sosial dan budaya yang mendasar. Pendidikan kewarganegaraan memiliki dampak yang signifikan dalam upaya integrasi bangsa, dan perannya masih sangat penting dalam menanamkan jiwa nasionalisme tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa depan bangsa. Kehadiran pendidikan kewarganegaraan sangat penting mengingat Indonesia

adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan kepercayaan, serta beragam budaya dan tradisi yang memerlukan manajemen yang baik untuk menjadikannya sebagai kekuatan dan kekayaan. Keanekaragaman dalam kehidupan sebagai bangsa akan memberikan warna yang kaya dalam budaya, memberikan peluang untuk menghargai keberagaman tersebut, yang pada gilirannya akan saling memperkaya dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan dan perkembangan Indonesia..

Pendidikan multikultural diimplementasikan melalui strategi dan konsep pendidikan yang memanfaatkan keberagaman masyarakat, terutama peserta didik, contohnya variasi etnis, budaya, bahasa, agama, gender, usia, dan kemampuan. Pembelajaran multikultural adalah proses yang bertujuan menghargai perbedaan manusia untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan bersama. Peran generasi muda sangat penting dalam membentuk peradaban suatu bangsa di masa depan. Jika situasi saat ini dianggap positif, generasi muda bertanggung jawab untuk memelihara atau meningkatkan kualitasnya.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan mendorong nilai-nilai moral dalam Pancasila, UUD 1945, semangat Bhineka Tunggal Ika, dan kesatuan Republik Indonesia. Secara sadar dan sistematis, siswa didorong untuk mempelajari kewarganegaraan sesuai dengan perkembangan psikologis dan latar belakang mereka. Namun, di SMP Negeri 1 Sawan, mata pelajaran kewarganegaraan sering dianggap membosankan dan kurang diminati oleh sebagian peserta didik. Kurangnya minat ini mungkin disebabkan oleh penggunaan metode ceramah yang mendominasi pembelajaran, serta kurangnya variasi dalam penggunaan media pembelajaran.

Oleh karena itu, penting untuk memilih pendekatan, metode, media, dan evaluasi yang sesuai agar pembelajaran kewarganegaraan menjadi lebih menarik dan efektif. Dengan mengintegrasikan metode yang inovatif, materi yang relevan, media yang menarik, sumber daya yang sesuai, dan evaluasi yang tepat, proses belajar-mengajar dapat menjadi lebih interaktif. Kurangnya minat terhadap mata pelajaran ini dapat mengakibatkan pemahaman yang kurang pada siswa dan berpotensi menyebabkan perilaku menyimpang di sekolah, seperti ketidakhadiran, pelanggaran tata tertib, dan konflik antar siswa.

Berdasarkan atas konsep dan pemasalahan yang satu sisi menganggap bahwa PPKn memiliki peran penting dalam menanamkan nilai karakter bagi siswa. Namun disisi lain

ternyata siswa tidak menerima pembelajaran PPKn dengan Maksimal. Oleh karena itu peneliti ingin mengangakat peneltian yang berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural dalam Memupuk Nasionalisme Siswa Kelas IX SMP Negeri 1 Sawan dan hal ini dianggap penting dalam rangka memupuk nasionalisme di kalangan siswa. Pertimbangan faktor-faktor tersebut, yang diperkuat dengan hasil-hasil penelitian terdahulu (Sujatmiko, 1999: 3; Adam,2001 : 3; Simbolon, 2002:2-6;

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang terkait dengan penelitian ini. Masalah tersebut antara lain:

1. Kesan siswa bahwa Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang membosan.
2. Relatif rendahnya kesadaran siswa dalam mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme di sekolah.
3. Kurangnya kesadaran akan latar belakang yang berbeda atau diantara siswa mendorong siswa untuk menunjukkan perilaku yang dilandasi oleh tingginya semangat nasionalisme dan budaya multikultural, saling menghormati dan menghargai antar sesama tanpa melihat perbedaan.

1.3 Pembatasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tentunya banyak yang terlibat penelitian dalam penulisan dan memperjelas agar tidak mengalami perubahan arah maka dari permasalahan yang diteliti dan diamati, maka peneliti membatasi masalah hanya pada pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural dalam memupuk nasionalisme.

3.5 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah diatas diidentifikasi masalah penelitian yaitu: Bagaimana pendidikan pancasila dan kewarganegaraan berbasis multukultural dalam memupuk nasionalisme siswa? Berdasarkan masalah penelitian diatas,dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses berlangsungnya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan berbasis multikultutal di SMP Negeri 1 Sawan ?

2. Bagaimana teknik dan strategi mengimplementasikan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan berbasis multikultural dalam memupuk nasionalisme?
3. Bagaimana hambatan mengimplementasikan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan berbasis multikultural dalam memupuk nasionalisme kelas IX SMP Negeri 1 Sawan?

3.5 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan melakukan kajian tentang pengembangan pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural dalam memupuk nasionalisme. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan informasi-argumentatif tentang:

Secara umum penelitian ini bertujuan melakukan kajian tentang pengembangan pendidikan pancasila kewarganegaraan berbasis multikultural dalam memupuk nasionalisme. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan informasi-argumentatif tentang:

1. Untuk mengetahui proses berlangsungnya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan berbasis multikultural di SMP Negeri 1 Sawan
2. Untuk mengetahui teknik dan strategi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan berbasis multikultural dalam memupuk nasionalisme
3. Untuk mengetahui hambatan mengimplementasikan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan berbasis multikultural dalam memupuk nasionalisme kelas IX SMP Negeri 1 Sawan

3.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kedua aspek, baik secara teoretis maupun empiris. Secara teoretis, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, meninjau, dan mengatur pembelajaran kewarganegaraan yang berbasis multikultural serta dampaknya terhadap konsep nasionalisme. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan landasan konseptual yang dibutuhkan untuk pengembangan nasionalisme melalui pendidikan kewarganegaraan.

Dari temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak sebagaimana diuraikan berikut:

a) Bagi siswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan motivasi belajar peserta didik, agar memiliki semangat belajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan serta dapat mengimplementasikan pendidikan pancasila kewarganegaraan berbasis multikultural sehingga dapat meningkatkan karakter baik terutama dilingkungan sekolah.

b) Bagi pendidik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan untuk dapat meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan pancasila kewarganegaraan berbasis multikultural.

c) Bagi penelitian lainnya

Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu, wawasan, referensi dan motivasi belajar peneliti lainnya untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dimasyarakat.

d) Sekolah

Hasil penelitian ini di harapkan dapat membangun dan memingkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran dan sebagai pertimbangan terhadap peningkatan kinerja guru.

